

KONDISI SOSIAL EKONOMI INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Muhammad Amir Dzaki¹, Rima Rahmawati², Ahmad Deedat Al-Haris³, Eko Ribawati⁴^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*Corresponding author : 2288230048@untirta.ac.id**Abstract**

The Reformation period in Indonesia, which began after the fall of the New Order regime in 1998, brought significant changes in the country's socio-economic conditions. This research examines Indonesia's socio-economic dynamics during the Reformation period, with a focus on changes in economic policy, the development of democracy, and its impact on society. Analysis shows that the Reformation era was characterized by economic liberalization, decentralization of power, and increased public participation in politics. Despite relatively stable economic growth, social and economic inequality is still a major challenge. The 1998 economic crisis left long-term impacts, but also prompted reforms in various sectors. This research uses a descriptive method by collecting various available sources through a historical methodology process, namely collecting sources, verifying sources, interpreting sources, and historiography or writing history chronologically. Key findings show that despite progress in terms of political freedom and economic reform, further efforts are needed to address social inequality, corruption and infrastructure development to achieve more equitable and sustainable development.

Keyword: Indonesian Reformation, Socioeconomic Conditions, Social inequality

Abstrak

Masa Reformasi di Indonesia, yang dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, membawa perubahan signifikan dalam kondisi sosial ekonomi negara. Penelitian ini mengkaji dinamika sosial ekonomi Indonesia selama periode Reformasi, dengan fokus pada perubahan kebijakan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa era Reformasi ditandai dengan liberalisasi ekonomi, desentralisasi kekuasaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Krisis ekonomi 1998 meninggalkan dampak jangka panjang, namun juga mendorong reformasi di berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan berbagai sumber yang tersedia melalui proses metodologi sejarah yaitu mengumpulkan sumber, verifikasi sumber, interpretasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah secara kronologis. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam hal kebebasan politik dan reformasi ekonomi, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan sosial, korupsi, dan pembangunan infrastruktur guna mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Reformasi Indonesia, Kondisi Sosial Ekonomi, Ketimpangan Sosial

PENDAHULUAN

Pada masa reformasi ini, perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998, di mana inflasi sudah diperhitungkan, namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Krisis keuangan yang menghantam Indonesia dan Asia lainnya pada tahun 1997-1998 menggerakkan serangkaian transisi ekonomi dan politik yang berpengaruh langsung pada cara pengelolaan Dana Reboisasi. Pada Januari 1998, IMF mengalirkan 43 miliar melalui perjanjian pinjaman dana penyelamatan dengan Pemerintah Indonesia yang berisi 50 persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah

pemerintahan Soeharto berakhir, para penggantinya mulai dari B.J. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan terutama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola sumber daya keuangan publik. Tiga pilar penting dalam reformasi keuangan selama periode reformasi yang telah dilakukan adalah penciptaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN), penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang efektif dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK atau Pengadilan Tipikor). Penelitian ini membahas bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pasca reformasi, keadaan ekonomi pada masa B.J. Habibie, keadaan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid, keadaan ekonomi pada masa Megawati Soekarnoputri, keadaan ekonomi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh setiap presiden. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu bagaimana kondisi sosial ekonomi Indonesia pasca reformasi, bagaimana kondisi sosial ekonomi pada setiap presiden, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh setiap presiden.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang keadaan sosial Indonesia pada masa reformasi, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan berbagai sumber yang tersedia melalui proses metodologi sejarah yaitu mengumpulkan sumber, verifikasi sumber, intepertasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah secara kronologis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian secara mendalam dan terperinci. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang eksplorasi atau setting sosial dan juga klarifikasi. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sistem sosial dan ekonomi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti buku, jurnal, arsip, koran, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi

Pada masa reformasi, perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Terdapat pemulihan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998, di mana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Di Indonesia, transisi ekonomi ini disertai oleh proses reformasi yang akhirnya menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Secara khusus, berbagai bentuk reformasi yang diperkenalkan bertujuan untuk membatasi "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme" yang telah mendominasi politik di Indonesia dan berbagai lembaga ekonomi selama masa Orde Baru. Permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru memberi dampak yang besar pada Indonesia. Permasalahan tersebut yaitu Indonesia menunjukkan hasil yang sangat lamban dalam pembenahan krisis multidimensi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negara membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukkan hasil yang membaik. Proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri dilarang, dan tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi titik optimal. Ketahanan sosial masyarakat dari penerapan kebijakan IMF hanya mengacu pada ketahanan ekonomi dan tidak begitu diperhatikan. Agenda Reformasi yang

mengedepankan ekonomi bangsa tetap menjadi fokus utama setiap pemerintahan di Indonesia. Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal yang konkret untuk menanggulangi krisis multidimensi, kemiskinan akibat korupsi, dan paket kebijakan yang ditawarkan IMF tidak bersifat on-the-ground solutions. Krisis keuangan yang menghantam Indonesia dan Asia lainnya pada tahun 1997-1998 menggerakkan serangkaian transisi ekonomi dan politik yang berpengaruh langsung pada cara pengelolaan Dana Reboisasi. Pada Januari 1998, IMF mengalirkan 43 miliar melalui perjanjian pinjaman dana penyelamatan dengan Pemerintah Indonesia yang berisi 50 persyaratan yang harus dipenuhi. Tujuan utama proses penyesuaian struktural adalah untuk rekapitalisasi kegagalan sistem perbankan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Melalui reformasi ini, IMF berusaha untuk melakukan pengaturan kembali sebagian besar segmen perekonomian Indonesia dan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya keuangan negara. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, para penggantinya mulai dari B.J. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan terutama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola sumber daya keuangan publik. Tiga pilar penting dalam reformasi keuangan selama periode reformasi yang telah dilakukan adalah penciptaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN), penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang efektif dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK atau Pengadilan Tipikor). Di bawah ini adalah penjelasan bagaimana masa kepemimpinan dari setiap presiden yang telah menjabat di negara Indonesia dilihat dari segi perekonomiannya. Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bidang ekonomi menghendaki ciri kerakyatan yang jelas.

B. Keadaan Ekonomi Pada Masa B.J. Habibie

Presiden BJ Habibie adalah presiden pertama di era reformasi. Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membuat perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit, banyak pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerja. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena di satu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Kondisi perekonomian pun semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997, persediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Ini adalah kesalahan Pemerintah Orde Baru yang mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi asli di masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat agraris dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dampak dari masalah yang dihadapi adalah masyarakat menjadi miskin dan bertambah beban pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie, membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP,

dan PDI. Presiden B.J. Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi, di mana beliau memulai dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis (Hakim and Giovani 2009). Selama pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie menghasilkan setidaknya 66 Undang-Undang yang mana salah satunya menegaskan arah perekonomian Indonesia dengan lebih jelas.

Beberapa kebijakan dikeluarkan sebagai upaya dalam mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk, minimal mampu memberikan perbaikan dalam masalah yang muncul akibat krisis moneter yang muncul pada tahun 1997-1998. Salah satu masalah yang muncul akibat krisis moneter di era Orde Baru adalah PHK yang dilakukan banyak usaha rakyat yang mengalami kebangkrutan, hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang juga meningkatkan angka kriminalitas. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, sehingga banyak orang memilih jalur cepat dalam mencari penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya. Kebijakan Presiden B.J. Habibie dilakukan bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional Indonesia yang terguncang sekaligus menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai komplikasi krisis moneter. Kebijakan Presiden B.J. Habibie salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia, meski hasilnya memang tidaklah signifikan namun pertumbuhan ekonomi penduduk yang sebelumnya mencapai angka -7,7% nyatanya bisa meningkat menuju angka 5%. Dengan independensi ini diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan lainnya adalah dengan memutar badan penyehat perbankan nasional atau BPPN serta lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia. Perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan moneter terus digiatkan sebaik mungkin. Dalam memperbaiki perekonomian nasional, Presiden B.J. Habibie melakukan beberapa hal di antaranya adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional yang ada.

C. Keadaan Ekonomi Pada Masa Abdurrahman Wahid

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi. Inflasi dan tingkat suku bunga Indonesia jauh lebih rendah. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif. Dengan seringnya kunjungan Gus Dur ke berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia, ternyata mendapat respon positif dari dunia. Bahkan kunjungannya juga membuka peluang kerjasama (terutama dalam perdagangan).

Pada masa pemerintahan Gus Dur, suasana demokratis juga mulai tampak terwujud. Mulai dari penghapusan berbagai peraturan yang merugikan kaum minoritas, pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif, hingga niat Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Semua tindakannya menunjukkan bagaimana kecenderungan Gus Dur menghargai kebebasan individu dan keberagaman.

Tetapi, selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik sehingga ketidakstabilan dalam politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Presiden Gus Dur menaikkan tingkat country risk. Hal ini ditambah lagi dengan buruknya hubungan antara pemerintah dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis, investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Implikasinya Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club karena sudah kelihatan jelas Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar hutang yang akan jatuh tempo tahun 2002. Bahkan Bank Dunia juga

sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru, jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Misalnya pergerakan IHGS menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang negatif. Selama periode tersebut IHGS merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

D. Keadaan Ekonomi Pada Masa Megawati Soekarnoputri

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun, Megawati menjadi presiden Indonesia yang kelima. Inflasi yang dihadapi pemerintahan Megawati juga sangat berat. Tingkat inflasi pada Juli 2001 sudah mencapai 7,7% padahal di era Gus Dur masih berkisar 2%. Bahkan laju inflasi tahunan selama periode Juli 2000-Juli 2001 sudah mencapai 13,5%. Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan karena selama asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi, pemerintah menargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4%.

Pada tahun 2002 kondisi perekonomian Indonesia sedikit lebih baik daripada tahun 2001, walaupun sempat digoncang dengan adanya bom Bali. Menurut perkiraan IMF, pertumbuhan PDB riil Indonesia pada tahun 2003 cukup optimis, yakni 4,5% dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,5%. Dalam hal perbankan, sektor perbankan merupakan faktor penghambat terbesar terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1997. Perbankan Indonesia berada di urutan terendah dalam hal standar dan kualitas pada tahun yang sama. Perbankan Indonesia masih buruk, tetapi tidak paling rawan jika dibandingkan di India dan Korea Selatan. Tingkat kerawanan dilihat dari peningkatan modal yang terjadi dibandingkan aset tertimbang menurut jenis risiko, terutama dengan mulai pulihnya aktivitas penyaluran kredit perbankan di Indonesia kawasan yang disurvei.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan oleh masih kurang berkembangnya investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lemahnya investasi disebabkan masih tidak stabilnya kondisi politik dan sosial serta belum adanya kepastian hukum di dalam negeri. Kondisi ini membuat para investor dalam negeri menunda keinginannya menanam modal di dalam negeri.

E. Keadaan Ekonomi Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono

Perjalanan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perkembangan yang dinamis. Ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan SBY dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Republik Indonesia keenam. Selama masa pemerintahannya, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil SBY seolah-olah tidak memihak kepada rakyat seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Pada masanya harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan presiden 2009 SBY menurunkan BBM.

Kebijakan ekonomi yang diambil pada pemerintahan SBY yaitu tentang kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Salah satu alasan pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM adalah karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia. Indonesia sebagai penghasil minyak yang besar seharusnya mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak tersebut dan tidak perlu mengurangi subsidi. Seperti pada masa Presiden Soeharto yang saat itu terjadi kenaikan harga minyak mentah yang berdampak pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Investasi pun mengalami kenaikan akibat ekspor minyak yang terjadi pada dasawarsa 1970-an dan berakibat pada bertambahnya pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Kenaikan harga BBM dimulai pada tahun 2005 yang semula berharga Rp. 1.810 menjadi Rp. 2.400. Puncak kenaikan harga BBM terjadi di bulan Mei 2008 menjadi Rp. 6.000 dan di bulan Desember mengalami penurunan menjadi Rp. 5.500. Di tahun 2008 Indonesia mengalami krisis keuangan dan pertumbuhan ekonomi menurun, namun presiden mengambil kebijakan menurunkan harga BBM. Puncak penurunan harga BBM terjadi di tahun 2009 menjadi Rp. 4.500. Kebijakan yang diambil Presiden SBY menarik untuk diteliti, 2008 Indonesia mengalami krisis tetapi pemerintah menurunkan harga BBM dan di tahun 2009 sebagai akhir dari periode I SBY menurunkan harga BBM menjadi Rp. 4.500. Penurunan harga BBM menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya di periode I karena meningkatnya perekonomian pasca krisis atau sebagai bentuk intrik politik untuk mendomplang suara agar rakyat kembali memilih SBY di pemilihan presiden 2009. Setelah tahun 2009 SBY kembali menaikkan BBM hingga Rp. 6.500. Kebijakan ekonomi terkait BBM dan BLT oleh pemerintah justru dijadikan sebagai alat untuk politik. Menjelang pemilihan presiden 2009 pemerintah menggulirkan kembali BLT dan menurunkan harga BBM. Hal tersebut dijadikan sebagai komoditi kampanye oleh calon presiden.

Adapun kebijakan ekonomi Islam yang diambil yaitu: tentang wakaf, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Perbankan Syariah, dan pengelolaan zakat. Pengambilan kebijakan pemerintah tidak terlepas dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Kebijakan yang diambil pemerintah mendapat persetujuan dan dukungan dari seluruh partai politik Islam. Partai Islam yang mendukung yaitu: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kenaikan harga minyak mentah dunia yang seharusnya memberi keuntungan bagi Indonesia sebagai penghasil minyak justru di masa SBY berdampak pada kenaikan harga BBM. Hal tersebut yang menjadi peneliti tertarik pada permasalahan ekonomi di masa SBY.

F. Kebijakan-kebijakan Setiap Presiden

1. B.J. Habibie

B.J. Habibie adalah presiden pertama era reformasi yang menjabat tahun 1998 hingga 1999. Beberapa kebijakan B.J. Habibie selama menjabat sebagai presiden yaitu membentuk 'Kabinet Reformasi Pembangunan' tahun 1998, melakukan pembekuan bank sebab banyak bank yang buka, namun tidak mempunyai fungsi akibat kurangnya nasabah, menjalankan pemisahan ABRI tahun 1999, memisahkan Polri dan TNI sesuai tugas masing-masing, mengadakan pemilu pertama tahun 1999, pencabutan Surat Izin Pendirian Pers atau SIUPP untuk penyaringan pers.

Kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus kepada politik di Indonesia. Habibie membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998. Beliau juga membuat kebijakan pembekuan bank karena waktu itu banyak bank yang buka tapi tidak berfungsi karena kekurangan nasabah. Selain itu, ada segelintir bank yang kurang bisa dipercaya dan bisa merugikan nasabah, maka dari itu pula lahirlah kebijakan tersebut. Kebijakan pemisahan ABRI juga dilaksanakan pada tahun 1999, memisahkan TNI dengan Polri sesuai dengan tugasnya masing-masing, yakni TNI untuk bidang pertahanan dan Polri untuk bidang keamanan.

Terus, B.J. Habibie juga bikin pemilu pertama di tahun 1999. Waktu itu partai-partai politik yang ikut pemilu rame lho, nggak kayak waktu Orde Baru, makanya dibilang lebih demokratis. Ada juga kebijakan pencabutan Surat Izin untuk Pendirian Pers atau SIUPP sebagai upaya penyaringan pers. Jadi sama Habibie dilihat dulu, mana TV, koran, atau siaran radio yang bagus. Kalau dinilai kontennya kurang baik, maka SIUPP-nya akan dicabut. Kebijakan lainnya meliputi pembebasan tahanan politik dari masa pemerintahan Soeharto, pembentukan partai politik, dan pengusutan kasus KKN.

2. Abdurrahman Wahid

Kebijakan yang pertama adalah pembubaran Departemen Penerangan yang komunikasinya adalah satu arah. Gus Dur juga menegaskan bahwa harus ada penghematan anggaran karena saat itu Rupiah lagi dalam kesulitan. Kemudian, ada penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk upaya mengurangi upaya Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ada pula kebijakan ramah Tionghoa. Awalnya, waktu masa pemerintahan Soeharto, orang-orang Tionghoa diminta untuk tidak memperlihatkan identitas mereka entah melalui nama, budaya, atau agamanya. Waktu masa pemerintahan Gus Dur, kebijakan ini dihapuskan. Beliau disebut sebagai Bapak Pluralisme yang merangkul semua keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang beliau buat.

Gus Dur juga mengusulkan pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah Negara Republik Indonesia. Usulan beliau ini merupakan salah satu upaya mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, sekaligus sebagai langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau menggiatkan politik bebas aktif dengan melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Pernah suatu kali beliau tersandung dugaan kasus Bruneigate dan Buloggate. Akhirnya, Gus Dur juga membentuk sebuah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang merupakan cikal bakal KPK, yang baru secara resmi dibentuk pada masa pemerintahan Megawati.

Gus Dur dipecat pada tahun 2001 karena berselisih dengan banyak lembaga termasuk DPR. Mereka bentrok karena Gus Dur dianggap melawan elit-elit yang punya kekuasaan dalam pemerintahan, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan ekstrim.

3. Megawati Soekarnoputri

Kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan Kabinet Gotong Royong yang dibentuk pada 2001, berfokus pada sektor ekonomi. Program kerja Megawati yang paling besar adalah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi KPK pada tahun 2002. Hal ini penting banget, soalnya dulu polisi, jaksa, hakim itu pada korupsi semua, padahal seharusnya mereka yang bertugas “membersihkan” korupsi. Megawati juga melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menjual aset negara. Yang dijual adalah Indosat pada tahun 2002 sebagai upaya untuk menutup utang luar negeri dari era Soeharto. Utangnya numpuk banget dan hasil dari utang itu nggak gitu keliatan, bahkan ada yang dikorupsi juga oleh keluarganya serta pihak-pihak yang lain. Sampai Megawati harus mengusahakan penundaan jatuh tempo utang Orde Baru, salah satunya adalah utang Paris Club.

Megawati melaksanakan persiapan pemilu langsung pada tahun 2003. Dulunya, presiden kan dipilih oleh MPR dari partai politik yang udah diseleksi sama DPR dan DPD. Tapi kebijakan pemilu yang dibuat oleh Megawati ini membuka pintu bagi rakyat untuk memilih langsung presidennya. Jadi nggak pasrah gitu aja dengan pilihan MPR. Kebijakan berikutnya adalah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004. Badan yang berfungsi untuk memulihkan perbankan ini dibubarkan karena setelah melalui krisis, bank-bank sudah dalam kondisi “pulih”.

Megawati juga mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) yang dulu diajak oleh Soeharto untuk membantu perekonomian Indonesia dengan beberapa syarat yang sebenarnya malah memberatkan rakyat, seperti pencabutan subsidi BBM. Berakhirnya kerjasama dengan IMF membebaskan rakyat dari kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Pada tahun 2003-2004, terjadi Gerakan Aceh Merdeka, upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia. Gerakan pemberontakan ini diatasi oleh Megawati dengan darurat militer. Jadi sempat ada konflik bersenjata di Aceh, hingga akhirnya situasi mereda hingga seperti sekarang.

Tapi pada akhirnya, masa pemerintahan Megawati berakhir pada 2004 karena beliau kalah dalam pemilu yang telah disiapkan sendiri olehnya sebagai bagian dari kebijakan.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Indonesia, yang berlangsung dari 2004 hingga 2014, ditandai dengan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan mengurangi kemiskinan. SBY fokus pada menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mempertahankan inflasi yang rendah, defisit anggaran yang terkendali, dan cadangan devisa yang cukup besar.

Berbagai upaya dilakukan untuk menarik investasi asing, termasuk melalui reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi. Misalnya, penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan pemberian insentif fiskal bagi investor asing. Peningkatan pengawasan terhadap sektor perbankan dan pasar modal dilakukan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Ini termasuk memperkuat otoritas pengawasan keuangan dan penerapan standar internasional dalam manajemen risiko.

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dengan berbagai proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi nasional. Berbagai program diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, serta program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar.

Upaya untuk mengurangi subsidi bahan bakar dilakukan secara bertahap, meskipun mendapat tantangan besar dari masyarakat. Ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara dan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih produktif. Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, termasuk melalui penyediaan subsidi pupuk, pengembangan irigasi, dan peningkatan akses pasar bagi petani dan nelayan.

SBY mendorong peningkatan perdagangan internasional dengan memperluas akses pasar ekspor Indonesia dan menjalin kerjasama ekonomi dengan berbagai negara dan blok ekonomi regional.

KESIMPULAN

Pada masa reformasi perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Terdapat pemulihan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 di mana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Di Indonesia, transisi ekonomi ini disertai oleh proses reformasi yang akhirnya menyebabkan mundurnya presiden Soeharto pada Mei 1998.

Krisis keuangan yang menghantam Indonesia dan Asia lain pada tahun 1997-1998 menggerakkan serangkaian transisi ekonomi dan politik yang berpengaruh langsung pada cara pengelolaan Dana Reboisasi. Pada Januari 1998, IMF mengalirkan 43 miliar melalui perjanjian pinjaman dana penyelamatan dengan Pemerintah Indonesia yang berisi 50 persyaratan yang harus dipenuhi. Tujuan utama proses penyesuaian struktural adalah untuk rekapitalisasi kegagalan sistem perbankan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Melalui reformasi ini, IMF berusaha untuk melakukan pengaturan kembali sebagian besar segmen perekonomian Indonesia dan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya keuangan negara.

Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, para penggantinya mulai dari B.J. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dan terutama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola sumber daya keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 15(2), 249-262.
- Bayu Bintoro, NIM.: 16120040 (2020) KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DI INDONESIA 2004-2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Eko Ribawati, M.pd, dkk. 2023. "Sejarah Sosial Ekonomi Kajian Masyarakat Jawa dan Banten". Banten : *Media Edukasi Indonesia*.